



Collaboration with:



IPB Dramaga Campus, Bogor (22 May 2026)

Closing Plenary "Imagining the Future: Lessons from Southeast Asia"
International Conference on Autonomous Social Sciences and Alternative
Development in Times of Multiple Crises (ICASAD 2026)

KONJUNGTUR ILMU SOSIAL OTONOM



Catatan menuju Agenda Penelitian yang
Akan Datang

Inaya Rakhmani

Asia Research Centre (ARC UI), Universitas Indonesia

Dialihbahasakan oleh Noer Fauzi Rachman

Ibu, bapak, kawan-kawan. Terima kasih kepada panitia atas kepercayaan untuk menutup pertemuan dua hari ini.

Dua hari ini kita habiskan dalam percakapan tentang ilmu sosial otonom dan pembangunan alternatif. Dalam dua puluh menit ke depan, saya ingin merefleksikan ke mana percakapan ini mengarah, dan saya melakukannya lewat tiga pertanyaan yang saya harap bisa membawa kita menuju sebuah agenda penelitian.

Izinkan saya mulai dengan proposisi yang membingkai cara saya membaca dua hari ini. Ilmu sosial otonom bukan doktrin yang kita anut, bukan pula posisi di luar gelanggang yang kita pertahankan. Ia terbentuk di dalam konjungtur, lahir dari dalam kontradiksi masa kini, selalu dalam keadaan yang tidak sepenuhnya kita pilih.

Konjungtur adalah istilah yang akan saya pakai sepanjang ceramah ini. Mengikuti Gillian Hart, Stuart Hall, dan Antonio Gramsci, saya memahami konjungtur sebagai momen yang spesifik secara historis, saat beragam kontradiksi (ekonomi, politik, ideologi, ekologi) mengendap dan memadat hingga memberi masa kini bentuknya yang khas serta susunan kekuatan sosial yang tertentu. Ia bukan konteks, bukan pula periode.

Konjungtur adalah masa kini yang terstruktur, titik tempat beragam temporalitas dan tekanan saling bertemu. Bekerja secara otonom berarti sanggup memahami kondisi material, kelembagaan, dan politik yang membuat kerja pengetahuan menjadi mungkin, bertahan dalam jangka panjang, dan berdampak. Kerja kita bersifat konjungtural karena kondisi yang kita huni pun konjungtural.

Seperti telah dikemukakan para pembicara konferensi ini, pembangunan Asia bukan proses yang stabil, melainkan serangkaian konjungtur, dan tiap konjungtur melahirkan imajinasi serta alternatif pembangunannya sendiri. Konjungtur kolonial menata ekstraksi lewat perkebunan, kerja paksa, dan *cultuurstelsel*, lalu melahirkan para pengkritiknya di kalangan intelektual anti-kolonial awal. Konjungtur developmentalis Perang Dingin menata

modernisasi lewat perencanaan negara dan bantuan asing, namun melahirkan pengkritik seperti Andre Gunder Frank, Samir Amin, dan Sajogyo kita sendiri. Konjungtur neoliberal menata pertumbuhan lewat pasar, deregulasi, dan integrasi Asia Tenggara ke dalam produksi global, dan dari rahimnya lahir studi agraria kritis, sosiologi kritis, Marxisme feminis, dan kajian dekolonial, agenda yang banyak di antara kita di ruangan ini ikut membesarkannya. Tetapi konjungtur hari ini bukan sekadar kelanjutan neoliberalisme. Ia adalah neoliberalisme otoriter yang menumpuk di atas krisis ekologi, sekaligus kapitalisme platform, dengan mode produksi ekstraktif di pertambangan, sawit, nikel, dan data yang berkelindan dengan represi, dan dengan apa yang disebut Vedi Hadiz sebagai pergeseran populis.

Tiga implikasi teoretis mengikuti dari sini. Pertama, apa yang kita sebut pembangunan alternatif selalu merupakan alternatif atas suatu tatanan hegemonik tertentu. Kedua, tokoh dan tradisi yang kita jadikan penunjuk arah pun lahir dari konjungtur, dan cara terbaik menghormati mereka adalah dengan memahami apa yang mereka hadapi. Ketiga, konjungtur menetapkan syarat kemungkinan bagi kerja kita sendiri, yang berarti ilmu sosial otonom bukan kritik yang melayang bebas, melainkan praktik yang berpijak pada situasi.

Karena itulah saya ingin menempatkan Sajogyo di pusat pertemuan ini, bukan sebagai bapak sosiologi pedesaan Indonesia, melainkan sebagai seorang intelektual, seorang subjek sejarah, pelaku kerja otonom yang konjungtural. Hidup intelektual Sajogyo membentang lebih dari setengah abad. Ia berkarya melintasi penghujung masa kolonial, eksperimen demokrasi singkat era 1950-an, konsolidasi Orde Baru, masa penyesuaian struktural, dan dekade-dekade awal neoliberal. Sepanjang tahun-tahun itu, ia berkukuh pada dua hal yang benar-benar alternatif pada zamannya. Ia membaca pedesaan Indonesia lewat kapitalisme, dan ia mempertahankan kelas sebagai kategori analitis justru ketika teori modernisasi dan kebijakan pembangunan sibuk menghapusnya.

Inilah alternatif pada zamannya. Imajinasi pembangunan yang hegemonik pada dekade-dekade pembentukan Sajogyo adalah modernisasi. Modernisasi memperlakukan desa sebagai kategori sisa, ruang yang belum modern dan tinggal ditarik masuk ke dalam ekonomi nasional melalui alih teknologi, penyuluhan pertanian, dan perubahan perilaku. Paradigma difusi inovasi yang dipaparkan Pak Djuara Lubis kepada kita pagi tadi adalah wajah komunikasi dari imajinasi yang sama, yang berputar di seputar persuasi, kesadaran, dan adopsi. Desa dalam imajinasi ini tak punya struktur kelas, yang ada hanya si lamban dan si pengadopsi dini. Petani adalah sasaran, bukan subjek.

Sajogyo menampik semua itu. Karyanya tentang garis kemiskinan, yang ia ukur dalam setara beras, adalah tindakan menegaskan bahwa kemiskinan punya struktur material yang secara sistematis luput dari penglihatan lembaga pembangunan.

Analisis kelas pedesaannya, kolaborasinya dengan Benjamin White dan yang lain tentang diferensiasi sosial desa Jawa, perhatiannya pada kepemilikan tanah, hubungan kerja, dan ekstraksi nilai lebih, semuanya adalah intervensi konjungtural. Semua itu menyatakan bahwa desa bukan pra-kapitalis, melainkan kapitalis dalam bentuknya yang khas, dan bahwa kita tak bisa memahami perubahan agraria Indonesia tanpa mengakui kenyataan itu.

Di titik inilah Ibu Pudjiwati memperpanjang garis itu. Seperti diperlihatkan Pak Donny Danardono, Ibu Pudjiwati mengambil analisis kelas yang dikembangkan Sajogyo lalu mengajukan pertanyaan lanjutannya, siapa sebenarnya yang mengerjakan kerja yang dibuat tak terlihat oleh pertanian kapitalis dan ideologi keluarga Orde Baru. Jawabannya, yang ia bangun di atas empat puluh makalah seminar dan laporan penelitian sepanjang 1972 hingga 1990, adalah bahwa perempuan di rumah tangga pedesaan Jawa bekerja sebelas jam sehari, berbanding delapan jam kerja laki-laki, bahwa kerja itu memiliki nilai ekonomi yang ditolak pengakuannya oleh dokumen perencanaan nasional (GBHN), dan bahwa rumah tangga bukan ranah

apolitis sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan 1974. Beban ganda adalah wujud berbasis gender dari kapitalisme agraria Indonesia. Kerangka Ibu Pudjiwati punya keterbatasan, seperti dicatat dengan cermat oleh Pak Donny, dan kritik feminis Marxis dari Ratna Saptari membuka lahan penting di seberangnya. Namun langkah dasar Pudjiwati, menegaskan kelas dan struktur material kerja perempuan, lahir langsung dari orientasi analitis yang sama yang dipertahankan Sajogyo.

Inilah yang saya maksud ketika menyebut Sajogyo alternatif bagi zamannya. Ia memakai perkakas analitis yang tersedia di masanya, fungsionalisme struktural dalam sebagian karya, kosakata modernisasi dalam karya lain, tetapi ia menampik depolitisasi yang lazimnya dijalankan perkakas itu. Ia berkukuh pada kapitalisme dan kelas sebagai inti analisis, dan justru karena itulah karyanya sampai ke masa kini. Analisis yang ia genggam adalah analisis yang perlu kita pulihkan untuk masa kini kita sendiri.

Syed Hussein Alatas, yang tradisinya dibawakan Prof. Syed Farid Alatas kepada kita kemarin, menyebut kerja semacam ini antitesis dari pikiran yang tertawan. Penolakan Sajogyo atas modernitas tanpa pembangunan bukan dekolonisasi yang abstrak. Ia adalah analisis kapitalisme yang konkret, berakar pada kehidupan pedesaan Indonesia. Meminjam kerangka Prof. Syed Farid, di sinilah Sajogyo dan Hussein Alatas bisa dibaca sebagai proyek yang sejajar di sepanjang kepulauan ilmu sosial otonom Asia Tenggara.

Dengan silsilah ini dalam ingatan, saya ingin mengajukan tiga pertanyaan kepada konferensi ini. Ketiganya pertanyaan reflektif, bukan solusi.

Pertanyaan pertama menyangkut pembangunan alternatif sebagai medan yang timpang. Jika praktik pembangunan alternatif terserak, sarat pertikaian di dalam dirinya sendiri, dan terbentuk justru di dalam konjungtur yang hendak ia lawan, apa artinya memahami praktik itu bukan sebagai sesuatu yang otomatis kontra-hegemonik, melainkan sebagai

medan timpang tempat ilmu sosial otonom mana pun harus belajar bekerja? Selama dua hari ini kita mendengar tentang koperasi, kolektif agroekologi, filantropi keagamaan, hak tanah masyarakat adat, aktivisme akademik, dan kritik atas platform. Paparan Kamerad Eduardo Tadem tentang MASSA begitu menjernihkan justru karena ia tidak meromantisasinya. MASSA lahir setelah dua puluh tahun keterlibatan yang gagal dengan ASEAN, ia bekerja di tengah masyarakat sipil nasional yang sangat beragam, dan ia harus mengarungi ekonomi politik pendanaan CSO, ketimpangan bahasa, dan tarikan gravitasi profesionalisasi LSM. Hal serupa berlaku bagi rekonstruksi sosio-epistemologis komunikasi pembangunan yang diusulkan Pak Djuara. Sebagiannya dibangun justru di dalam universitas-universitas teknis yang dulu melahirkan paradigma difusi. Praktik alternatif tidaklah murni. Ia terbentuk di dalam sekaligus melawan konjungtur, dan ilmu sosial otonom harus membacanya dalam keadaan yang penuh kontradiksi itu.

Pertanyaan kedua menyangkut hubungan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan akar rumput. Jika hubungan ini tak bisa diandaikan sebagai solidaritas yang muncul dengan sendirinya, apa syarat politik dan epistemik yang membuatnya bisa dibangun?

Konferensi ini kerap memakai rumus memberi suara kepada yang tak bersuara. Rumusan pertama menempatkan sarjana sebagai agen teoretis. Rumusan kedua menempatkan kita sebagai saluran bagi percakapan yang sudah ada. Sendiri-sendiri, keduanya tidak tepat. Produksi pengetahuan yang solider adalah hubungan yang dibangun, bukan diberikan. Ia menuntut infrastruktur kelembagaan yang mengesahkan kategori akar rumput ke dalam kerja ilmiah, sebagaimana Ibu Pudjiwati mengesahkan hari kerja sebelas jam melawan definisi kerja yang sempit dalam GBHN. Ia menuntut infrastruktur metodologis seperti yang didaftar Pak Djuara, *photo-voice*, analisis jaringan, etnografi komunikasi, semuanya cara menanam kemampuan mendengar ke dalam proses penelitian. Dan ia menuntut infrastruktur politik, yang saya maksud adalah aliansi nyata antara lembaga ilmiah dan organisasi gerakan yang membuat pengetahuan

mengalir ke dua arah. Lembaga-lembaga yang turut menyelenggarakan dan menyokong konferensi ini pun adalah subjek sejarah yang memproduksi pengetahuan alternatif. Merekalah syarat kemungkinan bagi kerja yang ingin kita perjuangkan.

Pertanyaan ketiga menyangkut infrastruktur intelektual regional. Jika otonomi ilmu sosial Asia Tenggara bergantung pada infrastruktur ini, bagaimana kita menjelaskan perkembangannya yang timpang dan ketimpangan di dalamnya, di hadapan mendesaknya keadaan hari ini?

Kita di ruangan ini adalah orang Indonesia, Filipina, dan kawan-kawan dari Australia, Belanda, Singapura, dan negeri-negeri lain. Namun kolega kita dari wilayah konflik, mereka yang hidup di bawah kendali junta, dan mereka yang pulau-pulaunya perlahan tenggelam, jauh lebih sedikit hadir. Ini bukan kegagalan penyelenggaraan, melainkan gejala konjungtural. Ia merefleksikan penyempitan ruang di bawah rezim otoriter di sejumlah negara, ketimpangan bahasa dan sumber daya di semua negara, dan ekonomi politik lembaga akademik yang dicatat Prof. Jun Borras.

Infrastruktur intelektual regional itu sendiri timpang dan sangat tidak setara, dan mendesaknya keadaan hari ini tidak mengizinkan kita menunggu ia membaik dengan sendirinya. Kita harus menjahitkan kapasitas relasional ke dalam kerja yang sudah kita jalankan, lewat penulisan bersama lintas kawasan, penerjemahan sebagai praktik intelektual yang sungguh-sungguh, dan konferensi seperti inilah yang menimbang dengan serius siapa yang sanggup bepergian dan siapa yang tidak.

Saya mengakhiri refleksi ini dengan mengajukan tiga komitmen cendekiawan-aktivis yang bisa menata kerja kita.

Komitmen pertama adalah bekerja secara konjungtural. Artinya memahami tiap krisis sebagai persoalan produksi pengetahuan yang spesifik secara historis. Artinya bertanya, bersama Marx, Gramsci, Stuart Hall, dan Gillian Hart, apa yang khas dari momen yang kita alami ini, dari tempat ini, dari

kekuatan-kekuatan sosial pada zaman ini. Konflik agraria, protes anti-otoritarian, rasa tak aman yang kian menebal di kalangan anak muda se-kawasan, semuanya konjungtur yang harus kita baca dengan cermat, dengan kesabaran yang dulu dibawa Sajogyo ke desa-desa Jawa.

Komitmen kedua adalah membangun infrastruktur kelembagaan alternatif yang kita rawat terus-menerus. Sajogyo Institute satu model untuk itu. Tetapi banyak sekali yang tercerai-berai dan bekerja di lingkarannya masing-masing, sarat perselisihan dan rebutan sumber daya. Dengan analisis konjungtural yang dalam, kuasa bisa diarahkan ke redistribusi alih-alih akumulasi, sebab infrastruktur cendekiawan-aktivis inilah yang menjaga syarat politik dan epistemik bagi kerja otonom, dan ia bertahan hidup hanya karena kita terus membangunnya. MASSA yang digagas Ed Tadem termasuk dalam komitmen ini.

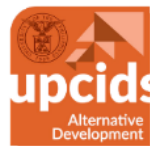
Komitmen ketiga adalah memandang serius perbandingan relasional sebagai praktik solidaritas. Perbandingan relasional lintas tempat dan lintas skala adalah upaya membaca satu formasi sosial melalui formasi sosial yang lain, untuk melihat apa yang disembunyikan dan apa yang justru tersingkap oleh masing-masing. Logika yang sama berlaku di Asia Tenggara. Membaca Indonesia berhadapan dengan Filipina, Thailand, Vietnam, dan Laos menajamkan analisis kita sendiri dan membuat solidaritas kita lebih cermat dan bermakna.

Inilah komitmen yang perlu kita pulihkan dan rawat. Infrastruktur kelembagaan yang dahulu memungkinkan Sajogyo mengerjakan kerjanya adalah infrastruktur yang harus kita bangun terus. Kita tidak menghormati Sajogyo dengan merayakannya atau menirunya. Kita menghormatinya dengan melakukan, di dalam konjungtur kita, apa yang ia lakukan di dalam konjungturnya, yaitu menempatkan kapitalisme dan kelas di pusat cara kita memahami masa kini, dan membangun syarat kelembagaan agar kerja itu mungkin dilakukan, bertahan dalam jangka panjang, dan berdampak.

Terima kasih.



Collaboration with:



IPB Dramaga Campus, Bogor